

## **POLEMIK TEORI PEMBANGUNAN TENTANG KEMISKINAN DAN KETERBELAKANGAN**

**Oleh: Agus Suryono \*)**

Saya masih ingat betul bagaimana kegundahan dan keraguan mahasiswa ketika mereka mengikuti kuliah dan mengkaji tentang teori pembangunan. Aah teori, *No Action Talk Only*, kata mereka. Sumber utama kegamangan mereka ternyata terletak pada sejauhmana mereka memandang bahwa kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan sosial semakin lama semakin merambah di masyarakat dan di muka bumi ini. Seakan tidak ada jalan keluar, tidak ada alternatif, dan bahkan semua jalan menjadi buntu.

Debat teori tentang masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial di masyarakat sudah cukup lama berlangsung di kalangan ilmuwan sosial barat maupun timur sejak abad ke 13 jamannya Thomas Robert Malthus sampai dengan abad 21 jamannya Muhammad Yunus dari India tentang pemberdayaan masyarakat bawah (*grass root*). Pada intinya, mereka memperdebatkan sebab musabab kurang berhasilnya program-program pembangunan terutama yang digalakkan seusa Perang Dunia Ke II dikebanyakan negara-negara berkembang dan yang terbelakang. Disisi lain, mereka juga melihat keberhasilan yang mengagumkan yang terjadi dalam program-program pembangunan Negara Jepang , sebagian Negara Eropa dan Amerika. Anehnya, dengan teori dan program yang relative sama usaha-usaha pembangunan tersebut ternyata tidak sukses di Negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia). *Why*, ada apa ini ?

Akhirnya, muncul pertanyaan besar tentang penyebab perbedaan-perbedaan itu. Antara lain salah satu jawabannya adalah karena secara kultural Negara dunia ketiga tidak mampu menyesuaikan diri dengan gaya hidup, gaya piker, dan gaya kesejahteraan masyarakat di Negara-negara industri maju. Negara dunia ketiga miskin (dengan sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai petani) karena tidak mempunyai perusahaan industri besar yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar pula. Mereka tidak memiliki perusahaan industri besar, karena mereka tidak memiliki modal (kapital) besar. Mengapa tidak memiliki kapital besar, karena mereka miskin. Mengapa mereka miskin, karena mereka tidak berpendidikan. Mengapa mereka tidak berpendidikan, karena mereka tidak punya uang (modal) untuk sekolah. Mengapa sekolahan menjadi penting, karena sekolahan merupakan komoditi dari ide-ide dan

lahan kepentingan dari kaum industri besar dan pemilik modal (tercatat di media Jawa Pos, 01/1/2011, masyarakat Indonesia yang mampu melanjutkan kuliah sekitar 6-7%). Teori seperti ini kemudian disebut oleh Mahbub Ul Haq (1976) sebagai teori mata rantai lingkaran tirai kemiskinan (*the cycle of proverties curtain theory*).

Dari sini kemudian timbul sejumlah konsep dan gagasan untuk menanggulangi perbedaan keadaan diantara kedua jenis negara tersebut. Bahkan bukan sekedar kebetulan, bahwa konsep tersebut memang datang dari negara maju yang disebutkan diatas tadi.

Negara yang baru merdeka tadi, menurut para ahli ekonomi barat harus dibebaskan dari lingkaran setan kemiskinan: ***tidak mempunyai industri karena miskin, dan miskin karena tidak mempunyai industri***. Untuk keluar dari lingkaran setan itu, negara itu memerlukan uang dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan industrialisasi.

Sejak itulah berkembang berbagai rencana pembangunan yang menjadi pegangan bagi negara-negara yang baru merdeka tersebut, yang pada pokoknya mempunyai kesamaan pula: bertujuan untuk secepatnya mengejar ketinggalan dari negara maju, melalui pembangunan ekonomi yang mengikuti jejak negara-negara maju tersebut. Terutama karena didesak oleh keinginan untuk sesegera mungkin meraih kemakmuran, dan juga bayangan pengalaman pahit sebagai negara terjajah, disamping baru saja menyelesaikan perang untuk mendapatkan kemerdekaan masing-masing, maka pada umumnya negara-negara baru ini tanpa sadar memimpikan suatu jalan pintas untuk membangun negaranya.

Negara-negara baru merdeka kebanyakan pada jaman itu tidak begitu cermat dalam mempertimbangkan perbedaan latar belakang sosio kultural mereka dengan negara-negara maju yang akan dituruti langkahnya itu. Padahal perbedaan tersebut sesungguhnya tidak memungkinkan negara baru tadi untuk sepenuhnya menempuh langkah dan tahapan yang persis sama seperti yang telah dijalani oleh negara maju dalam mencapai kemakmuran.

Para pemikir pembangunan dikala itu menurut Servaes (1986) seolah-olah begitu yakin bahwa masalah keterbelakangan atau ketertinggalan yang terdapat dinegara miskin daat diatasi dengan penerapan ( yang kurang lebih secara mekanistik). Sistem ekonomi dan politik yang ada dibarat kenegara-negara dunia III. Keyakinan itu tampaknya di dasarkan pada asumsi bahwa perbedaan yang terdapat adalah dalam hal derajat (*degree*) ketimbang jenis pembangunan itu sendiri. Karena itu unsur sentral pemikiran pembangunan ketika itu adalah metafora pertumbuhan (*growth*) dan mengidentikkan pertumbuhan dengan kemajuan (*progress*).

Pemikiran seperti inilah yang menimbulkan kesan seolah-olah pembangunan adalah sesuatu yang organik, tetap ada dalam (*immanent*), terarah (*directional*), kumulatif, purposif, dan tidak dapat diubah lagi (*irreversible*).

Paradigma (dapat diartikan sebagai pola atau model berpikir yang di dukung oleh sejumlah teori) pembangunan yang berlaku pada masa itu, yang juga dikenal sebagai paradigma “Modernisasi”, memandang pembangunan sebagai suatu perspektif yang tunggal arah (*unilinear*), dan bersifat evolusioner. Para ahli pembangunan merumuskan keadaan keterbelakangan dalam bentuk perbedaan yang dapat dilihat (*observable*) dan kuantitatif antara negara-negara miskin dan kaya disatu pihak, dan antara sektor tradisional dengan sektor modern di negara-negara miskin itu sendiri.

Jarak yang terdapat antara negara kaya dengan negara miskin itu hendak dijumpai melalui pembangunan yang diartikan sebagai suatu proses peniruan (imitatif process) dalam tahapan-tahapan yang begitu rupa sehingga secara bertingkat (*gradual*) pula sektor-sektor yang ada maupun negaranya sendiri pada masyarakat tradisional akan memiliki “kualitas” yang modern.

Dalam praktek, ternyata kemudian modernisasi amat berbentuk “**Westernisasi**” dalam arti, negara baru itu harus mengikuti dan menjalin sepenuhnya model dari barat. Padahal , seperti kata Schramm (1979), negara berkembang mestilah menyadari betapa “*history specific*”-nya model pembangunan barat itu sebenarnya. Model tersebut sesungguhnya memang ditempa (*tailored*) untuk suatu situasi yang besar sekali perbedaannya dengan misalnya India, atau ekuador, Yaman, Somali, Tunisia, atau Sudan untuk menyebut beberapa contoh.

Oleh karena itu dalam perkembangannya teori ini banyak mendapatkan kritik, antara lain disebutkan: (1) bahwa teori modernisasi hanya permainan kata manis, tapi prakteknya intervensi imitasi bukan inovasi; (2) modernisasi analog dan sinonim dengan westernisasi, urbanisasi, industrialisasi, sekularisasi, yang hakekatnya sama dengan istilah modernisasi itu sendiri; (3) Kepalsuan menyederhanakan persoalan sebab akibat, dimana lebih menekankan pada korelasi tunggal atau linear bahwa modernitas sebagai penentu modernisasi. Padahal dalam modernisasi bisa terjadi hubungan timbal balik (kontinuum); (4) kepalsuan pandangan dunia yang mengaku benarnya sendiri (*etnosentris*), dimana konseptualisasi modernisasi diwarnai oleh preferensi ideologis dan pertimbangan nilai sebagai abstraksi sistem sosial budaya masyarakat industri barat. Bahwa bangsa baratlah yang superior dibanding dengan bangsa lain di Asia dan Afrika;

(5) adanya kepalsuan ketiadaan tujuan, yakni terjadinya bias a-historis yang di dasarkan pada gejala mutakhir yang dialami oleh masyarakat-masyarakat kontemporer sebagai perbedaan antara situasi kondisi kemarin dan hari ini; (6) terjadinya Kepalsuan terhadap realita (*anti tesis ideasional*) yang bertitik tolak pada dikotomi nilai-nilai modern, transisi dan tradisional sebagai dasar penentuan model budaya modernisasi; (7) adanya kepalsuan ketidak normalan perubahan dengan asumsi bahwa model teoritik modernisasi menganggap bahwa masyarakat-masyarakat tradisional menentang perubahan, karena perubahan dianggap mengganggu. Padahal perubahan itu sendiri bersifat pasti dan alami (*natural*) yang bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja dari bangsa mana saja; (8) adanya kepalsuan jaminan yang berlebihan dan bersifat umum, yakni adanya keyakinan yang berlebihan bahwa institusi-institusi yang mengalami modernisasi akan memiliki fungsi-fungsi positif dalam masyarakat tradisional; (9) adanya kepalsuan penalaran yang melingkar, dimana kebanyakan para teoritisasi modernisasi berangkat dari definisi modernitas menurut terma-terma dan ciri-ciri yang terbatas yang di duga berhubungan dengan masyarakat maju/modern. Semua ciri yang tidak sesuai dengan kontribusi tipe ideal modernisasi dibuang sebagai kategorisasi tradisional; (10) adanya kepalsuan agregasi kualitatif dengan asumsi bahwa modernisasi merupakan keseluruhan jumlah perangkat kualitas yang mudah diatur dan di kuantifikasikan; (11) adanya kepalsuan efek yang menetes kebawah. Asumsinya bahwa ketika terjadi kontak antara masyarakat maju dan masyarakat terbelakang, maka lembaga-lembaga yang disebut terdahulu terangkat melalui lapisan-lapisan yang berbeda dan menjangkau ke setiap bidang sistem sosial yang disebut terakhir; (12) teori modernisasi bias jadi sebagai doktrin dosa asal (turunan). Pandangan ini berasumsi bahwa keterbelakangan masyarakat yang sedang berkembang disebabkan keadaan asalnya yang ditandai oleh sistem feodal, askripsi, partikularisme keluarga, perekonomian subsistens, dan sejumlah besar nilai-nilai dan lembaga-lembaga tradisional lainnya; (13) teori modernisasi sebagai doktrin pra-syarat. Asumsinya bahwa seperangkat ciri tertentu merupakan prasyarat yang harus dipenuhi bagi modernisasi masyarakat yang sedang berkembang, yang berarti merupakan peniruan (*replikasi*) sifat-sifat budaya tertentu yang di duga berhubungan dengan masyarakat maju atau masyarakat barat; (14) teori modernisasi sebagai doktrin menyama ratakan keadaan (*konvergensi*). Asumsinya, bahwa masyarakat yang sedang berkembang dianggap tidak terarah dan cenderung mengikuti jejak langkah masyarakat industri barat dengan harapan pada akhirnya dapat menyamai mereka; dan melambangkan bahwa masyarakat industri modern merupakan prestasi

manusia yang tertinggi. Padahal universalitas produk akhir tidak selalu sama dengan contoh dan cara-cara awal.

Kondisi diatas merupakan bentuk kelemahan dari teori modernisasi yang sering disoroti dalam prakteknya, padahal isi yang esensial dari model pembangunan barat (modernisasi), yakni **industrialisasi produksi**, jelas merupakan sesuatu yang harus terjadi pada model pembangunan yang manapun jika suatu masyarakat akan merealisasi mimpi modern untuk hidup yang lebih baik. Yang menjadi soal kata Schramm lagi, pada tahap yang mana dan dengan kecepatan berapa hal itu seyogyanya dilakukan ?. Shramm menunjukkan, salah satu bab sejarah Amerika yang cenderung diabaikan orang dalam memikirkan model pembangunan adalah kenyataan bahwa bahkan Amerika Serikatpun mengalami suatu revolusi pertanian lebih dahulu, sebelum melampaui revolusi industri mereka.

Model pembangunan yang dibutuhkan dunia ke III pada saat sekarang ini bukanlah suatu model dunia ke III atau tiga benua, melainkan lebih pada suatu rangkaian model nasional yang dibuat oleh bangsa yang bersangkutan yang didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh mengenai kebutuhan nasional bergerak pada kecepatan berapa saja yang layak, dan diarahkan menuju apa yang dipersepsikan oleh negara dan masyarakat tersebut sebagai tujuannya. Singkatnya adalah untuk menjawab pertanyaan : **Negara macam apa yang ingin di bangun ?**

Pemikiran yang terakhir ini memunculkan teori-teori yang berusaha menjelaskan mengapa kurang berhasilnya program pembangunan di Negara-negara dunia ketiga di dalam “meniru” taraf kemajuan dan kemakmuran Negara industri maju. Secara konsepsional dalam hal ini bisa disebutkan adanya dua rumpun teori yang berusaha menjelaskan fenomena kemiskinan dan keterbelakangan yang berkepanjangan di Negara-negara sedang berkembang. Rumpun teori pertama cenderung mempermasalahkan faktor-faktor di dalam diri masyarakat yang sedang membangun itu sendiri sebagai *inner drive* dan penyebabnya. Sedangkan rumpun teori kedua cenderung mempersalahkan faktor-faktor diluar dari masyarakat yang sedang membangun tersebut sebagai *outer drive* dan penyebabnya.

Dalam rumpun teori pertama, yang sangat terkenal dan menonjol adalah teori modernisasi. Menurut teori ini, kemiskinan dan keterbelakangan yang berjalan berkepanjangan itu (terutama yang terjadi di Negara-negara berkembang) disebabkan karena berkembangnya *mindset* nilai-nilai budaya yang tradisional dalam masyarakat. Modernitas individu pada kebanyakan warga masyarakatnya masih rendah. Kesadaran individupun juga rendah. Mereka

tetap miskin dan terbelakang karena masyarakatnya malas bekerja dan terbelenggu dengan etos kerja tradisional. Bahkan sebagian dari mereka kurang menghargai nilai waktu (untuk bekerja produktif), menyerah pada nasib, tunduk pada alam, kawin usia dini, bangga dengan keturunan (*dynasti*), bangga dengan prestise, mengutamakan *okol* daripada akal (premanisme), dan sebagainya. Akhirnya mereka di nilai sebagai masyarakat yang tidak produktif (jelasnya, sebagai masyarakat konsumtif) sebagai pilihan cara hidup dan gaya hidup yang tidak terdapat dalam ciri-ciri masyarakat (modern) industri di Barat (Eropa, Amerika, dan Jepang).

Dalam rumpun teori kedua, yang menonjol adalah teori ketergantungan struktural (*dependency structural theory*). Menurut teori ini, berkepanjangan kemiskinan dan keterbelakangan suatu masyarakat karena bermainnya kekuatan luar yang dominan dan eksploitatif. Ini bisa terjadi akibat hubungan antar Negara (*foreign interaction*) di dunia, juga antar kelompok masyarakat dalam suatu Negara. Dengan kata lain, kemiskinan dan keterbelakangan dalam suatu masyarakat bisa muncul disebabkan adanya kekuatan faktor luar yang menjajah dan mengeksploitasi suatu bangsa atau Negara tertentu yang tidak bisa “dilawan” (*vulnerability*). Beberapa catatan penting tentang teori structural pada umumnya berpangkal pada filsafat materialism yang dikembangkan oleh Karl Marx, tetapi teori ketergantungan structural justru membantah membantah tesis marx (sendiri) yang menyatakan bahwa kapitalisme akan menjadi cara produksi tunggal yang menciptakan proses maupun struktur masyarakat yang sama disemua Negara yang ada di dunia ini. Teori ketergantungan struktural berpendapat bahwa kapitalisme yang berkembang di Negara-negara yang menjadi korban imperialism dan kolonialisme tidak sama dengan perkembangan (pembangunan) kapitalisme dari Negara-negara imperialisme dan kolonialisme yang menyentuhnya sebagai aktor. Adapun kapitalisme di Negara-negara pinggiran merupakan kapitalisme yang semu, sakit, dan sulit berkembang sebagaimana Negara kapitalisme centrum. Bahkan kemiskinan yang terdapat di Negara-negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif (menindas), dimana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang Negara yang lemah; maka surplus dari Negara-negara dunia ketiga beralih ke Negara-negara industry maju. Perdagangan dunia yang bebas (*free trade*) justru merupakan tempat praktek-praktek eksploitasi ini. Dengan demikian, Negara-negara pinggiran yang pra-kapitalis merupakan Negara-negara yang tidak dinamis dan tidak produktif dengan memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara-cara produksi feodal di Eropa dan

Amerika yang memang dan menghasilkan karakter kapitalisme tulen. Akhirnya, Negara-negara pinggiran setelah disentuh oleh kapitalisme tulen dan maju diharapkan akan bangun dan berkembang untuk mengikuti (meniru) jejak Negara-negara kapitalis maju.

Sebagaimana teori modernisasi, teori ketergantungan struktural (*dependensia*) juga tidak terlepas dari kritik-kritik. Beberapa kritik yang muncul, antara lain: (1) teori ini dianggap terlalu mendramatisir keadaan dan di lebih-lebihkan (*over acting*). Sehingga tercipta suatu image seakan-akan terjadi ketergantungan antara negara yang kuat (*leading sectors*) dengan negara yang miskin (*legging sectors*); (2) kaum *dependensia* dianggap telah memutar balik (*mendistorsikan*) sejarah, terutama yang menyangkut hubungan historis antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang; (3) pandangan kaum *dependensia* tentang kontradiksi yang fundamental di dunia antara Pusat dan Periferi ternyata tidak berhasil memperhitungkan struktur-struktur klas produksi di periferi yang menghambat terbentuknya tenaga produktif; (4) teori *dependensia* cenderung untuk berfokus pada masalah pusat dan modal internasional karena kedua hal itu dipersalahkan sebagai penyebab kemiskinan dan keterbelakangan, ketimbang masalah pembentukan klas-klas sosial lokal; (5) teori *dependensia* dianggap telah gagal dalam membedakan antara kapitalis dengan feodalis, atau bentuk-bentuk pengendalian produser masa pra-kapitalis lainnya, dan perampasan keuntungan (*appropriasi surplus*); (6) teori *dependensia* dianggap telah mengabaikan produktivitas tenaga kerja sebagai titik sentral dalam pembangunan ekonomi nasional, dan meletakkan tenaga penggerak (*motor force*) dari pembangunan kapitalis dan masalah keterbelakangan pada transfer surplus ekonomi pusat ke periferi; (7) teori *dependensia* juga dinilai telah menggalakkan suatu ideologi berorientasi kedunia ketiga yang meruntuhkan karakter dan potensi solidaritas klas internasional dengan menyatukan semuanya sebagai “*musuh*”, yakni baik elit maupun massa yang berada di bangsa-bangsa Pusat (*negara centrum*); (8) teori *dependensia* dinilai statis, karena ia tidak mampu untuk menjelaskan dan memperhitungkan perubahan-perubahan ekonomi di negara-negara berkembang dan terbelakang menurut waktu dan perubahannya.

Kendatipun demikian dalam dunia akademis kedua teori tersebut diatas sampai saat ini sama-sama terus dikembangkan dan dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial di Barat maupun di Timur dengan modifikasi-modifikasi tertentu yang disebut sebagai rekonstruksi teori maupun dekonstruksi teori. Walaupun keduanya masih memiliki kelemahan dan kelebihan untuk keluar dengan jawaban yang sangat berbeda; bahkan saling berlawanan antara yang satu dengan yang

lain. Padahal jika kita obyektif, kedua teori tersebut sebenarnya ingin menjelaskan fenomena yang sama, yakni tentang kemiskinan dan keterbelakangan.

Barangkali, kenyataan yang sedikit berbeda dan berlawanan tersebut karena rumpun teori yang satu berada pada kubu “Pembela” sistem masyarakat kapitalistik, sedangkan rumpun teori yang satunya lagi berada di posisi yang “Melawan” sistem masyarakat kapitalistik. Sebab, teori ketergantungan (struktural) sedikit banyak bertolak dari asumsi teori konflik dan evolusi historiknya Karl Marx yang kelahirannya me-reaksi terhadap segala penindasan dan penderitaan kelas pekerja dalam masyarakat industri yang kapitalistik. Sedang teori modernisasi yang cenderung etnosentris dan “Darwinisme Sosial”, menempatkan sosok masyarakat industri kapitalis (barat) sebagai tolok ukur keunggulan, kemajuan, dan kemakmuran yang hedonistik.

Jawaban dari masing-masing teori tadi memang patut di hargai kontribusinya dalam menjelaskan fenomena kemiskinan dan keterbelakangan berkepanjangan di Negara-negara sedang berkembang. Hanya saja kedua teori tadi (termasuk teori *human capital* yang serumpun dengan teori modernisasi dan teori *liberation* yang serumpun dengan teori ketergantungan) masih belum banyak menyentuh akar persoalan yang bersifat ideologi-sentrik di masing-masing lingkungan warga bangsa yang sedang membangun itu. Suatu misal untuk kasus di Indonesia, masyarakat atau bangsa Indonesia terdapat indikasi kuat, dulunya termasuk manusia pekerja yang rajin dan berprestasi dalam menguasai alam lingkungannya dengan karakter sosialnya (khususnya etos kerjanya) mampu menyikapi alam sebagaimana masyarakat atau bangsa modern dan maju (*inner direction*), kendatipun mereka masih hidup dalam struktur ekonomi masyarakat tradisional. Hal itu tercermin dengan masih luasnya hamparan lahan pertanian (baik persawahan, tegalan, dan tambak) di lingkungan pedesaan yang telah ditinggalkan oleh generasi pendahulunya.

Sayangnya, dalam beberapa generasi belakangan ini, masyarakat petani di pedesaan Indonesia barangkali benar-benar terlihat malas dan kurang produktif sebagaimana dituduhkan oleh teori modernisasi. Atau, mungkin juga sudah berbudaya malas sejak dulu-dulunya sebagaimana dituduhkan oleh JH. Boeke dan Koentjaraningrat. Pertanyaannya, mengapa budaya kerja bangsa Indonesia cenderung terus menjadi malas dan tidak produktif? Apakah memang karena masalah mental karakter bangsa atau memang karena kurangnya lapangan kerja yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran (Data Bappenas 2009, menyebutkan angka penduduk miskin Indonesia 15,42%, dengan angka tingkat pengangguran terbuka sekitar 8,46%).



Persoalan ini menjadi sangat urgen yang tidak tersentuh oleh para pengembang teori-teori modernisasi.

Pertanyaan yang tidak tersentuh oleh teori-teori modernisasi tersebut, nampaknya dapat dijawab oleh teori ketergantungan (struktural), yaitu dengan menuding penyebabnya pada kekuatan eksploitatif Negara asing sebagai penjajah dalam sistem kolonialisme baru atau imperialisme gaya baru yang sudah berabad-abad lamanya berlanglang buana di muka bumi (Nusantara) ini. Dan, bahkan dengan terang-terangan kelompok strukturalis menuding adanya kekuatan eksploitatif yang berasal dari dalam negeri sendiri sebagai kelompok komprador.

Tentunya, jawaban dari kelompok teori ketergantungan itu patut dipertanyakan kebenarannya. Sebab, bisa jadi istilah eksploitasi merupakan salah satu saja dari kekuatan unsur baru yang diterimakan kepada masyarakat dan bangsa (Indonesia) selama ini ketika berinteraksi dengan bangsa dan negara lain. Mungkinkah di era global ini, suatu Negara-bangsa tanpa berkontak dengan Negara dan bangsa lain? Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa masih banyak unsur budaya baru (selain budaya eksploitatif) yang berkembang dan adopsi di *nation state* tertentu (suatu misal nilai *corporate culture* dan pedoman *International Standard Organization*, dan sebagainya).

Oleh karena itu, sudah tiba saatnya para ilmuwan (sosial) melakukan kajian mendalam berdasarkan pengalaman nyata (empiris) dan historik masing-masing Negara- bangsa (khususnya di Nusantara Indonesia) ini, guna menjelaskan fenomena kemiskinan dan keterbelakangan yang memang bersifat kompleks. Hal tersebut sangat relevan dan mendesak di era pembangunan saat ini, khususnya untuk menunjang upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi isu sentral dalam tahapan pembangunan kita sekarang ini. Disamping, juga berguna untuk memunculkan teori-teori alternative lainnya (*another development theory*) yang lebih memuaskan daripada jawaban dan penjelasan teori modernisasi dan teori ketergantungan sebagaimana yang kita polemikkan diatas. Inilah polemik sisi gelap dan kotak hitam (*black Box*) yang perlu segera kita bongkar bersama untuk menjadi terang benderang sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan (khususnya di masyarakat Indonesia). Bukankah kita memerlukan kebebasan, kesejahteraan, penegakan hukum, etika dan akhlak yang baik untuk membangun bangsa ini?. *Wallahua 'lam bis showab !*

\*) Prof. Dr. Agus Suryono. SU  
Adalah Guru Besar Administrasi Pembangunan  
Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya

